

ABSTRAK

Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota? Apakah hambatan proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota ? Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 Ayat 1 Dan Ayat 2 Di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota ?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Proses penyidikan tindak pidana tentang mata uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) di Sat Reskrim Polres Cirebon Kota terhadap tersangka Hasan Basir meliputi tindakan berupa: (a) Penangkapan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan; (b) Penahanan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan; (c) Penyitaan barang bukti selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan; (d) Pemeriksaan saksi sehingga didapat alat bukti keterangan saksi-saksi; (e) Pemeriksaan tersangka (f) Kemudian dilakukan pembahasan berupa analisa kasus dan analisa yuridis dengan dasar yang digunakan adalah Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; (g) Pembuatan resume oleh penyidik/penyidik pembantu lalu dibuatkan kesimpulan. Hambatan yaitu Pertama, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) di lapangan menyangkut pembuktian tindak pidana pengrusakan uang kertas rupiah terutama terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai *organized crime*. Kedua, lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku pengrusakan uang kertas rupiah pada sistem pembuktian. Ketiga, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku pengrusakan uang kertas rupiah sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur subjektif yakni *mens rea*. Solusi antara lain: a) Penanggulangan kejahatan pengrusakan uang kertas rupiah yang dilakukan oleh Polri, b) Kerjasama kepolisian baik regional maupun internasional dapat dilakukan melalui interpol, badan-badan pemerintah lainnya atau secara langsung.

Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Mata Uang

ABSTRACT

In the history of regulating the types and prices of currency in Indonesia after the independence period, 4 (four) laws regulating currencies were established. The formulation of the problem in this research is: How is the process of investigating criminal acts concerning currency based on Law Number 7 of 2011, Article 35 Paragraph 1 and Paragraph 2 of the Police Crime Unit of Cirebon City Police? What are the obstacles to the process of investigating criminal acts concerning currency based on Law Number 7 of 2011, Article 35 Paragraph 1 and Paragraph 2 at the Police Unit of the Cirebon City Police? What is the solution to overcome the obstacles in the process of investigating criminal acts concerning currency based on Law Number 7 of 2011, Article 35 Paragraph 1 and Paragraph 2 of the Police Crime Unit of Cirebon City Police?

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with investigators in the jurisdiction of the Cirebon City Police. And secondary data obtained from literature studies related to the theory of law enforcement and criminal liability.

Based on the results of the research that the process of investigating criminal acts concerning currency based on Law Number 7 of 2011, Article 35 paragraph (1) and paragraph (2) at the Cirebon City Police Criminal Investigation Unit against the suspect Hasan Basir includes actions in the form of: (a) arrest against the suspect, which is then made an Official Report of the Arrest; (b) The detention of a suspect, which is then made an Official Report of the detention; (c) Confiscation of evidence, then an official report of confiscation is made; (d) Examination of witnesses so that evidence of the testimony of witnesses is obtained; (e) Examination of the suspect (f) Then a discussion is conducted in the form of case analysis and juridical analysis on the basis of which are Article 35 paragraph (1) and (2) Law Number 7 of 2011 concerning Currency; (g) Making a resume by the assistant investigator / investigator and then drawing a conclusion. Obstacles are First, the lack of coordination among law enforcement officers in the field regarding evidence of the destruction of rupiah banknotes, especially against perpetrators categorized as organized crimes. Second, the weakness of the investigations against the perpetrators categorized as the perpetrators of destroying the rupiah banknotes in the evidence system. Third, investigations currently carried out by investigators are limited to the perpetrators of destroying rupiah banknotes, resulting in difficulties in fulfilling the subjective element, namely mens rea. Solutions include: a) Overcoming the crime of destroying rupiah banknotes committed by the Police, b) Police cooperation, both regional and international, can be carried out through Interpol, other government agencies or directly.

Keywords: Investigation, Crime, Currency